



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SRI WIHARNANTO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 209555

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 2.281.500.000

1. Tanah Seluas 342 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 342.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 353 m2/130 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 794.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 148 m2/140 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 2976 m2/2976 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 395.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 472.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO JEEP Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY SCOOPY Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOBIL, HONDA BRV Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 215.950.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 55.232.689

F. HARTA LAINNYA

Rp. 75.775.232

Sub Total

Rp. 3.100.457.921

III. HUTANG

Rp. 574.498.034

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.525.959.887



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.